



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 699-710

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Budaya Politik Masyarakat Desa Tonala
(Studi Pemilihan Sangadi Tonala Kecamatan Posigadan Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022)

Sri Astuti Djibalu¹, Udin Hamim², Ramli Mahmud³

Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan,

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo

Email: sriastutidjibalu@gmail.com¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana budaya politik masyarakat Desa Tonala Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta teknik pengumpulan data melalui tiga tahapan yakni, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya politik masyarakat Desa Tonala lebih cenderung pada budaya politik parokial yakni tingkat pendidikan yang rendah ditandai dengan partisipasi politik dalam menentukan hak politiknya masih mengikuti pada satu sumber yaitu kepala keluarga atau ayah. Sementara Budaya politik kaula merupakan budaya politik tingkat pendidikan yang tinggi, namun orientasi memilih masih mengikuti orang yang dituakan dalam keluarga. selanjutnya faktor yang menghambat budaya politik masyarakat desa Tonala adalah faktor patron klien dan kinsip, yang lebih mengedepankan hubungan kekerabatan sehingga dapat mempengaruhi orientasi masyarakat dalam memilih calon Sangadi. Adapun kesimpulan dari penelitian ini bahwa budaya politik masyarakat desa Tonala tergolong pada orientasi yang negatif, yang ditandai dengan orientasi memilih masih mengikuti orang tua.

Kata Kunci : *Budaya Politik, Pilkades, Masyarakat*

Abstract

Abstracts This study aims to find out how the political culture of the people of Tonal Village, Posigadan District, South BolaangMongondow Regency. This study uses qualitative methods with a descriptive approach and data collection techniques through three stages, namely, observation, interviews, and documentation. The results showed that the political culture of the people of Tonal Village is more inclined to parochial political culture, namely a low level of education characterized by political participation in determining their political rights still follows one source, namely the head of the family or father. While Kaula political culture is a political culture of a high level of education, the orientation of choosing still follows the aged person in the family. furthermore, the factors that hinder the political culture of the people of Tonal village are the patron factor of clients and kinsip, which prioritizes kinship so that it can influence the orientation of the community in choosing candidates for sangadi. The conclusion of this study is that the political culture of the people of Tonal village is classified as a negative orientation, which is characterized by the orientation of choosing still following parents.

Keywords: *Political Culture, Elections, Society*

PENDAHULUAN

Pemerintah desa sebagai salah satu wadah yang sangat dekat dengan masyarakat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat bila dibandingkan dengan lainnya. Pernyataan kemudian adalah, apakah dengan euforia demokrasi desa melalui Pemilihan langsung Kepala Desa akan membawa kemajuan dalam pembangunan desa maupun dapat mencerdaskan demokrasi masyarakat. Tentunya, pernyataan tersebut menimbulkan spekulasi yang berbeda sesuai dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat desa. Hampir sebagian besar pemerintahan desa belum mampu dalam menerjemahkan kebutuhan masyarakat desa dan masih mengisahkan banyak masalah. Hal kemudian menjadi bumerang bagi penyelenggaraan demokrasi masyarakat desa maupun pemerintahan desa.

Dalam kondisi demikian, dapat dipastikan bahwa belum adanya sinkronisasi atas pengejawantahan demokrasi bagi masyarakat desa dengan produk substansial demokrasi diantaranya, kesejahteraan, kecerdasan/ Pendidikan, kenyamanan serta unsur pemenuhan kebutuhan masyarakat desa. Dengan demikian maka, penelitian ini dilatari oleh akar musabab pemilihan kepala desa melalui pendekatan Budaya politik masyarakat sangatlah beralasan, dimana produk atas Pilkades melalui kepala desa yang terpilih merupakan output dari partisipasi politik masyarakat yang tak bisa di lepaskan dari orientasi tingkat kebijakan oleh masyarakat itu sendiri.

Berbagai kajian tentang budaya politik terkait erat dengan gagasan (Almond and Sidney Verba 1984), diantaranya budaya politik yang sempit (Parokial), kaula atau subjek dan budaya partisipan. Praktik budaya politik Parokial ditandai dengan rendahnya tingkat pendidikan publik, yang mengarah pada partisipasi politik masyarakat terpola pada kekuasaan terpusat baik secara formal maupun nonformal. Sementara itu, budaya politik kaula ditandai dengan nilai subjektivitas kekuasaan terhadap masyarakat. Kaulanya sendiri memiliki kesamaan dengan budaya politik parokial, yang membedakannya adalah aspek Pendidikan dianggap

layak bagi masyarakat pemilih namun pada keputusan politiknya mengarah kepada patron atau orang yang dianggap berpengaruh dalam komunitas tertentu.

Untuk menjawab pernyataan sebelumnya maka, budaya politik partisipan layaknya menjadi pegangan atau pertimbangan nilai bagi masyarakat dalam pemilihan kepala desa. Prinsip atau nilai yang terkandung dalam budaya politik partisipan harus di praktek lewat sikap dan keputusan politik dalam mendukung atau tidak mendukung calon. Kepentingan politik mereka lebih rasional, tidak ada pertimbangan lain selain dari unsur kebutuhan dan aspek kemanfaatan dan keuntungan atas pilihan golongan ini terhadap calon. Dengan demikian, agar terdapat sinkronisasi antara transformasi demokrasi masyarakat desa dengan produk Pilkadaes dapat terjadi jika masyarakat desa dapat menerapkan budaya politik partisipan dalam Pilkadaes.

Harapan tersebut tentunya juga mengalami kendala, tidak dapat dinafikan bahwa hampir secara keseluruhan budaya politik masyarakat Indonesia terpolarisasi pada budaya patrimonial dan neo patrimonial. Dimana, unsur kebapaan atau orang yang dituakan atau tokoh dalam kalangan masyarakat menjadi patron preferensi politik masyarakat. Afiliasi keluarga, kerabat dekat menjadi urgen dalam pertimbangan politik masyarakat pada umumnya. Dalam temuannya Mahmud, dkk (2020) bahwa faktor penghambat budaya politik masyarakat disebabkan oleh faktor patron klien, kinsip, dan ekonomi. Akan tetapi yang menghambat budaya politik masyarakat desaTonalal adalah patron klien dan kinsip yang mana hanya mengedepankan hubungan kekerabatan untuk menentukan hak politiknya, dalam artian bahwa mereka memilih bukan atas dasar program yang ditawarkan akan tetapi atas dasar hubungan emosional saja.

Atas permasalahan tersebut kesadaran politik masyarakat itu masih sangat rendah, hal ini pun sama dengan temuannya Kelana, dkk (2022) yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat itu disebabkan oleh pekerjaan dan kurangnya kepercayaan terhadap calon lainnya. Atas argumentasi tersebut bahwa kurangnya keikutsertaan masyarakat itu karena terlalu sibuk dengan agenda dalam memenuhi urusan kebutuhan sehingganya masyarakat tidak ikut dalam setiap agenda-agenda politik maka hal ini pada proses menentukan hak politiknya hanya berdasar pada hubungan emosional.

Dari perdebatan tersebut Yusrin & Salpina (2023), dalam temuannya bahwa partisipasi politik masyarakat itu sangat berpengaruh terhadap kemenangan seorang figure dalam pemilihan, kemudian juga untuk meningkatkan partisipasi politik melalui sosialisasi terhadap masyarakat dapat memberikan manfaat begitu besar terhadap tingkat kesadaran politik. Untuk itu sebagai warga Negara yang baik maka harus ikut serta dalam setiap pengambilan keputusan atas dasar pertimbangan pada setiap program yang telah ditawarkan oleh setiap calon kandidat.

Sementara dalam temuannya (Toton 2015), mengemukakan bahwa budaya politik dayak dalam sangat tinggi dalam pemilihan legislative 2014, hal ini pun ditandai dengan pengetahuan, perasaan, dan sikap atas pilihan politiknya sangat tinggi, dengan demikian bahwa kesadaran politik masyarakat sudah maksimal karena mereka sudah memberikan hak

pilihnya sesuai dengan atas pertimbangan yang matang. Hal demikian terjadi disebabkan tingginya rasa ingin tahu masyarakat terhadap politik dan para elit politik memiliki karismatik sehingganya masyarakat dapat berpartisipasi dengan baik, dalam artian bahwa masyarakat sudah membantu Negara dalam mensukseskan demokrasi melalui agenda-agenda politik. Kemudian juga dalam temuannya (Arafah 2022), karismatik seseorang elit politik dapat membawa pengaruh besar pada lingkungannya bahkan hal itu dapat meminimalisir atas permasalahan yang terjadi Karena bisa saja akan bekerjasama tanpa ada perbandingan sama sekali.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas bahwa budaya politik masyarakat Desa Tonalu dalam pemilihan Sangadi masih perlu adanya pembenahan sebab masih banyak masyarakat yang rendah atas preferensi politiknya, hal ini pun dapat terlihat pada observasi awal hingga sampai pada tahapan wawancara bahwa budaya politik masyarakat, khususnya budaya politik parokial, dan budaya politik kaula yang antara kedua budaya politik tersebut memiliki keterikatan. Akan tetapi yang membedakan dari sudut pendidikan saja. Kemudian faktor yang menghambat budaya politik masyarakat, faktor patron klien, dan faktor kinsip, dari kedua faktor tersebut sangat berpengaruh besar terhadap tingkat partisipasi masyarakat.

Hal ini pun terlihat bahwa pada prosesi menentukan hak politiknya hanya atas dasar pada hubungan emosional saja bukan atas dasar pada visi dan misi yang telah ditawarkan oleh calon kandidat. Bahkan ada yang memberikan argumentasinya bahwa mereka memilih seorang calon yang dekat ataupun memiliki hubungan darah karena lebih mudah dalam mengurus administrasi yang ada didesa. Dengan demikian bahwa budaya politik masyarakat Desa Tonalu dalam pemilihan sangadi masih sangat rendah, maka dari itu pendidikan politik terhadap masyarakat harus ditingkatkan untuk menumbuhkan kesadaran politik masyarakat dalam ikut serta setiap agenda-agenda politik hususnya pada demokrasi yang berada pada tingkatan desa.

METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Moleong (2005), Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk menginterpretasi kejadian yang terjadi pada objek penelitian, misalnya: tingkah laku, pemahaman, insentif, respons. Baik berupa format bahasa dan kalimat, baik konteks alamiah, menggunakan berbagai metode ilmiah, dilakukan secara holistik dan deskriptif. Metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Selain proses pengumpulan informasi, perlu juga dijelaskan dalam bentuk deskripsi dan analisis yang mendalam. Hubungannya dengan hal tersebut, objek penelitian ini berhubungan dengan budaya politik maka (Sugiyono 2018), Pendekatan deskriptif berkaitan dengan perumusan adanya masalah dengan variabel independen, baik satu atau lebih variabel, beberapa sampel yang berbeda, dan dalam waktu yang tak sama. Atas dasar itu, maka penelitian yang berhubungan dengan objek budaya politik masyarakat pada Pemilihan Kepala Desa

Tonala Tahun 2022 sangat tepat dalam pendekatan deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Budaya Politik Masyarakat Desa Tonala Dalam Pemilihan Sangadi Tonala Tahun 2022

Menurut (Almond dan Sidney Verba 1984), budaya politik terdiri atas tiga indikator diantaranya budaya politik parokial yang merupakan budaya politik masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah; budaya politik kaula yang sebagian besar masyarakat sudah berpendidikan tinggi; budaya politik partisipan menunjukkan preferensi politik masyarakat sudah maksimal, hal ini ditandai dengan keikutsertaan masyarakat dalam agenda politik serta memilih berdasarkan kebutuhan masyarakat. Berangkat dari teori diatas dan disinkronisasikan dengan observasi awal menunjukkan bahwa budaya politik masyarakat Desa Tonala lebih cenderung pada budaya patrimonial yang ditandai dengan ikatan kekeluargaan atau kekerabatan. Oleh karena itu, Cukup sulit untuk mengejewantahkan budaya politik partisipan bagi masyarakat desa Tonala karena masih terdapat hambatan realisasi prinsip yang dimaksud. Untuk menerjemahkan hal tersebut, budaya politik masyarakat masih terperangkap pada budaya politik parokial dan kaula.

Hubungannya dengan temuan tersebut, (Mahmud, Asmun Wantu and Rusli Limalo 2020) dalam studi tentang masyarakat pesisir mengemukakan bahwa masyarakat pesisir lebih berorientasi pada budaya politik parokial dan kaula bila dibandingkan dengan budaya politik partisipan. Studi tersebut memiliki kesamaan dengan temuan lapangan, dimana masyarakat Desa Tonala yang secara geografis adalah masyarakat pesisir dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2022 lebih pada pendekatan atau budaya politik parokial dan kaula. Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua polarisasi dalam penguatan budaya politik dalam Pilkades di Desa Tonala, diantaranya adalah :

Pertama budaya politik parokial. Desa Tonala merupakan bagian dari daerah administrasi kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Demografi penduduk menunjukkan bahwa hamper secara keseluruhan masyarakat desa Tonala berasal dari etnis Gorontalo. Disisi lain, tingkat Pendidikan masyarakat masih jauh dari apa yang diharapkan. Kondisi seperti ini akan dapat melahirkan polarisasi atas kondisi sosial dan politik termasuk pemilihan kepala desa. (Almond dan Sidney Verba 1984), mengemukakan bahwa budaya politik parokial ditandai dengan adanya tingkat Pendidikan yang rendah yang mengakibatkan pada preferensi dan keputusan politik masyarakat berdasarkan pada actor yang dianggap merepresentasikan kepentingan masyarakat, faktanya, masyarakat Tonala dengan ketidaktahuan masyarakat atau minimnya pengetahuan mengenai politik menjadikan masyarakat berpikir secara sempit dalam menentukan pilihannya.

Artinya, masyarakat hanya mengikuti kebijakan dari patron yang dianggap memiliki pengaruh dibandingkan dengan masyarakat lain. Pola pikir masyarakat yang termasuk dalam budaya ini menjadikan pemikiran masyarakat lebih sederhana. Masyarakat akan ikut terlibat dalam agenda demokrasi ketika waktu pemilihan tiba dengan keputusan memilih calon berdasarkan pada orang yang dituakan. Kondisi demikian juga digambarkan oleh (Pureklolon

2021) bahwa budaya politik di Indonesia merupakan perwujudan nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia, sebagai pedoman kegiatan berpolitik dalam negara. kenyataannya budaya politik Indonesia hingga dewasa ini belum banyak mengalami perubahan/pergeseran dan perpindahan yang berarti, meskipun sistem politiknya sudah beberapa kali mengalami perubahan.

Disisi lain, (Kelana, et al. 2022) dalam temuannya mengemukakan bahwa yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat disebabkan oleh pekerjaan dan tingkat kepercayaan terhadap calon yang rendah, sehingganya hal tersebut dapat mempengaruhi keikutsertaan masyarakat karena kurangnya pendidikan politik terhadap masyarakat yang menjadi problem yang dirasakan oleh masyarakat. Pada praktek budaya politik masyarakat Tonala cenderung pada budaya parokial yang ditandai dengan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah dan mengakibatkan partisipasi masyarakat terpola pada kekuasaan terpusat baik secara formal maupun nonformal. Dengan demikian untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat harus melalui dengan pendidikan yang matang. Atas hal tersebut.

Temuan penelitian tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh (Sucipto 2015) bahwa dalam prakteknya, hamper secara keseluruhan budaya politik parokial dan kaula mendominasi budaya politik masyarakat dalam perhelatan demokrasi, baik melalui Pemilu, Pemilukada maupun Pilkades. Hanya sebagian kecil masyarakat yang terpila pada budaya politik partisipan sekitar 2,1%. Kondisi seperti ini juga mejadi temuan penelitian, dimana masyarakat di Desa Tonla terpola pada budaya politik parokial. Atas hal tersebut, (Mahmud, Yunus and Adjie 2022) mengemukakan terdapat kecenderungan budaya politik parokial menjadi hambatan dan permasalahan utama dalam mendorong pemilih yang partisipatif dalam berbagai ragap realitas sosial masyarakat Indonesia. Dengan demikian, temuan (Akmaludin and Ibrahim 2022) tentang identitras etnis yang dikonstruksikan melalui symbol dan basis masa mejandi penting untuk dikonstruksikan sebagai budaya politik parokial masyarakat dalam Pemilihan Kepala desa Tonala. Artinya, apa yang menjadi temuan (Astuti and Qolbi Khoiri 2023) pendidikan politik menjadi kunci utama dalam membangun budaya politik pasrtisipan bagi masyarakat desa Tonala dalam Pemilihan Kepala Desa.

Kedua Budaya Kaula, (Mahmud, Yunus and Adjie 2022) mengemukakan bahwa budaya politik kaula dapat diukur melalauai kemapanan tingkat Pendidikan amsyarakat, namun dalam dukungan dan pilihan politik tetap terpatron pada actor yang dianggap masyarakat merepresentasikan kepentingan seluruh masyarakat. Temuan penelitian menunjukan budaya politik kaula menjadi pengaruh besar dalam partisipasi masyarakat Desa Tonala dalam Pemilihan Kepala Desa, dimana orang yang dianggap berpendidikan dan orang yang dianggap berpengaruh dalam komunitas menjadi acuan masyarakat dalam berpartisipasi. Masyarakat Tonala lebih tertarik memberikan partisipasinya pada calon yang dalam lingkungan mereka memiliki pengaruh ataupun calon yang lebih sering berkomunikasi dan menjadi pemberi nasehat dan melihat bagaimana kinerja dari kandidat pemimpin terlepas dari apa yang menjadi tujuan utama seorang pemimpin sehingga apa yang seharusnya

menjadi kebutuhan ataupun hal-hal yang di inginkan masyarakat Tonala bukanlah alasan utama masyarakat memberikan hak pilihnya.

(Kantaprawira 2006) mengemukakan bahwa budaya politik mempengaruhi pola pikir perilaku individu dan orientasinya dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi Negara, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati oleh anggota masyarakat setiap harinya. Budaya politik juga sebagai suatu system nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan public untuk masyarakat seluruhnya. Hal tersebut berkesinambungan dengan temuannya (Yusrin and Salpina 2023) bahwa partisipasi seorang pemilih itu sangat berpengaruh terhadap kemenangan seseorang calon dalam sebuah pemilihan, dengan demikian untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat harus melalui pendidikan politik agar seorang pemilih itu sadar akan tugasnya sebagai warga Negara yang baik. Pada argumentasi tersebut dapat terlihat bahwa keikutsertaan masyarakat dalam Negara demokrasi sangat dibutuhkan sebab dari putusan mereka untuk menentukan hak politiknyadapat berdampak besar pada hasil dan kemenangan seseorang dalam pemilihan.

Budaya politik kaula yang dianut oleh masyarakat Desa Tonala ditandai dengan nilai subjektivitas kekuasaan terhadap masyarakat. Kaulanya sendiri memiliki kesamaan dengan budaya politik parokial, yang membedakannya adalah aspek pendidikan dianggap layak bagi masyarakat pemilih namun pada keputusan politiknya mengarah kepada patron atau orang yang dianggap berpengaruh dalam lingkungan tertentu. Secara keseluruhan, budaya politik masyarakat terpolarisasi pada budaya patrimonial dan neo patrimonial dimana unsur kebapaan atau orang yang di tuakan atau tokoh dalam kalangan masyarakat menjadi patron preferensi politik masyarakat.

Temuan penelitian mengenai orientasi budaya politik kaula dalam pemilihan kepala Desa Tonala tidak berbeda dengan (Sucipto 2015), (Akmaludin and Ibrahim 2022) dan (Astuti and Qolbi Khoiri 2023) seperti apa yang digambarkan sebeumnya. Subjektifitas pemilih atas objek yang berdasarkan pada pertimbangan kaula lebih mendominasi budaya politik masyarakat di desa Tonala. Atas kesatuan identitas dan suku atau etnis Gorontalo, namun dari segi pertimbangan politik masyarakat lebih cendeung pada pertimbangan tokoh dan actor politik. Jangankan masyarakat yang representasi pendidikannya di bawah, kemampuan tingkat Pendidikan cenderung kurang rasional dalam memantapkan dukungan dan pilihan politik. Atas keterpilihan yang berpedoman pada actor dan tokoh tertentu efektif dalam memenangkan calon incumbent bila dibandingkan dengan calon lainnya.

kebanyakan masyarakat Tonala dalam memberikan partisipasinya sering kali masih melihat pada calon yang memiliki kecakapan terutama pada rasa simpati atas dasar memiliki hubungan kekeluargaan dengan kandidat pemimpin. Kesesuaian capaian obsevasi dengan hal tersebut ialah dimana atas Pilkades Tahun 2022 kandidat yang memenangkan pertarungan menjabat kepala desa merupakan kepala desa lama yang mencalonkan diri kembali. Tidak dapat dipungkiri bahwa mayoritas masyarakat Tonala memang memiliki kepercayaan serta mempercayakan Desa Tonala ditangan beliau atas dasar simpati dalam

ruang lingkup memiliki ikatan darah ataupun ikatan kekeluargaan ditambah lagi pada masa kepemimpinannya tidak adanya kecurangan namun juga tidak adanya perkembangan Desa yang signifikan.

Faktor Yang Mendorong Budaya Politik Masyarakat Desa Tonalu Pada Pemilihan Sangadi Tonalu Tahun 2022

Capaian informasi pada saat meneliti, peneliti memperoleh data kemenangan kepala desa Tonalu sangat dipengaruhi oleh afiliasi calon pada ikatan kekeluargaan dan kekerabatan. Data tersebut dituangkan dalam tabel dibawah ini.

Table 1. Perolehan Suara Calon Kepala Desa Tonalu

No	Nama Calon	Perolehan Suara		Jumlah
		TPS 1	TPS 2	
1	Dikson Atuna	113	95	208
2	Jery Arifin Urumi	42	16	58
3	Kirman Lapatu	45	47	92
4	Yamin Tangahu	189	259	448
Jumlah		389	417	806

Sumber : Panitia Pemilihan Kepala Desa Tonalu 2022

Apa yang dikemukakan di atas sama halnya yang berlaku bagi masyarakat desa Tonalu, dimana budaya masyarakat lebih cenderung pada budaya patrimonial yang ditandai lewat ikatan kekeluargaan dan kekerabatan. Dengan kondisi demikian membangun pandangan dan kepribadian masyarakat berlandaskan pada kebijakan sistem parokial maupun kaula atau subjek. Argument atas hal tersebut sangat beralasan, dimana keberadaan calon Yamin Tangahu yang memperoleh suara 448 suara terbanyak dari calon lainnya merupakan incumbent, selain itu kekeluargaan dan kekerabatan yang melahirkan preferensi budaya politik parokial dan kaula efektif dalam pemenangan calon tersebut dalam Pemilihan Kepala Desa Tonalu pada Tahun 2022. Kondisi ini yang membuat praktek penyelenggaraan transformasi demokrasi bagi masyarakat di desa Tonalu belum efektif sesuai dengan apa yang diharapkan. Salah satu kendalanya adalah Budaya Politik Parokial serta Kaula yang merupakan landasan penduduk Tonalu ketika merepresentasikan kepentingan politiknya di saat Pilkades.

R. Mahmud, dkk (2020) mengemukakan bahwa faktor yang menghambat budaya politik masyarakat terbagi atas tiga yakni : faktor klien, budaya politik birokrasi lebih mengedapankan pada pantron baik dalam kekuasaan formal maupun nonformal; faktor kinsip, hubungan kekerabatan antar masyarakat; dan faktor kondisi ekonomi, yang dalam kondisi tertentu, kondisi ekonomi sering beririsan dengan patron dalam hal ini pemilik modal dalam lingkungan masyarakat. Atas teori tersebut, faktor yang mendorong budaya politik masyarakat Desa Tonalu dalam pemilihan Sangadi ialah faktor patron klien dan kinsip sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh peneliti.

Faktor Patron Klien, dalam sebuah pemilihan tentunya membutuhkan sebuah

hubungan untuk mencapai hasil tertentu, oleh sebab itu dalam pemilihan sangadi di desa Tonalas sesuai dengan data yang telah didapatkan dalam penelitian bahwa hubungan itu sudah terjalin antara calon dengan tim sukses maupun dengan masyarakat langsung. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan masyarakat dengan masyarakat lainnya ataupun dengan calon langsung sangat berpengaruh terhadap saat pengambilan keputusan.

(Irvan dan Priyatno 2019) dalam temuannya menunjukkan adanya keterkaitan antara kader Partai Golkar dengan masyarakat pendukung serta jaringan Partai yang meluas dan tersusun dari Bupati hingga tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi bukti kuatnya pengaruh faktor patron klien. Kuatnya hubungan antar patron terlihat dari jaringan tokoh-tokoh masyarakat dan kaderisasi partai mempengaruhi pola pikir masyarakat dalam memilih. Selalin itu, kepopularitas, kualitas serta finansial juga menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih.

Temuan tersebut memiliki kesesuaian dengan temuan (Muhamad dan Nugroho 2022), yang menunjukkan bahwa relasi patron klien di Kabupaten Grogoban dapat dilihat dari hubungan pribadi antara Bupati Pertahana dengan kepala desa dikarenakan hutang budi; hubungan loyalitas antara politis dengan pemimpin daerah; hubungan resiprokal transaksional antara pemilik kekuasaan dengan masyarakat. Salah satu jalan untuk mereduksi konflik sosial akibat proses politik dalam pilkada langsung yaitu relasi kuasa antara pemilik kekuasaan yaitu Pejabat Bupati dengan pemilik suara yaitu masyarakat di Kabupaten Grogoban merupakan hubungan patron yang di sebut sebagai pengendali konflik. Hubungan calon dengan masyarakat sudah berjalan dengan baik begitupun dengan sesama masyarakat walaupun masih ada beberapa pendukung yang saling menjatuhkan antara satu sama lain namun tidak terjadi konflik antara pendukung.

Dalam argumentasi yang dibangun oleh (Fadli 2016), dalam temuannya bahwa faktor patron klien terjadi dalam pemilihan kepala desa disebabkan oleh kandidat yang bertarung dalam pemilihan kepala desa memiliki tanah yang cukup oleh sebab itu masyarakat yang menempati diatas tanahnya harus memilih dirinya, bahkan orang yang tidak tinggal dalam tanah sang tuan tanah tidak dapat berbuat baanyak hal karena mereka menganggap hanya buang-buang waktu, tenaga dan biaya saja. Kemudian juga yang lebih mempererat hubungan pantron klien ini dikarenakan adanya pertukaran jasa yang cukup sistematis dimana tuan tanah hanya membiarkan orangng yang tinggal diatas tanahnya selama puluhan tahun tanpa ada pungutan biasa sama sekali akan tetapi ada aturan yang harus ditasti sebagai kensekuensi dalam pertukaran jasa ini jika ada sebuah ajang pemilihan baik itu pemilu maupun pilukada bahkan sampai pada tataran pemilihan kepala desa masyarakat harus taat atas perintah dari tuan tanah. Dari penjabaran diatas bahwa masyarakat tidak dapat berbuat banyak hal sebab segala keputusan yang menyangkut tentang pilihn politik berada ditangan yang tuan tanah.

Hal yang berbeda dengan temuannya (Arafah 2022) bahwa dengan karismatik yang masih terjaga maka dapat menempatkan diri pada semua sisi artinya bahwa konflik yang terjadi bisa saja dapat diselesaikan bahkan bisa melakukan kerja sama yang baik dan

seimbang agar permasalahan tersebut dapat diminimalisir. Dengan demikian bahwa karismatik seseorang itu dapat mengurangi perselisihan yang bahkan bisa menyelesaikan atas masalah yang terjadi pada perhelatan demokrasi yang ada didesa.

Argumentasi tersebut berkesinambungan dengan temuan peneliti dalam pemilihan Sangadi di Desa Tonal, karena melalui relasi keluarga untuk memenuhi derajat yang dimiliki dalam keluarga hal lain juga untuk mempermudah dalam urusan administrasi ketika diperlukan. Dalam hubungan patron klein juga terjadi antara tim sukses dan calon sehingganya komunikasi dan strategi untuk memenangkan selalu terarah pada koridor yang telah disepakati bersama hal yang menonjol juga dalam hubungan patron klien terjadi antara calon dengan masyarakat relasi cukup baik berhubung kandidat yang mencalonkan sudah pernah memegang kekuasaan dalam hal ini sebagai petahana dalam pemilihan sangadi yang ada di desa Tonal cukup mudah untuk membangun komunikasi dengan masyarakat.

Faktor Kinsip, jejaring kekerabatan sangat perlu dalam setiap pemilihan agar suara dalam keluarga itu tidak pisah pada calon yang lain, kemudian juga supaya terlihat oleh pesaing-pesaing yang lain bahwa dalam hubungan keluarga itu masih utuh antara satu dengan lainnya. Pada konteks ini (Yusuf dan Asriani 2020), hubungan kekerabatan sangat berpengaruh terhadap tingkah laku politik seseorang dalam menentukan hak pilihnya, atas dasar itu dalam pemilihan kepala daerah Morowali 2018 sangat menonjol kekerabatan yang terjadi di Torukuno berdasarkan pada pelapisan sosial. Selain itu juga preferensi masyarakat pemilih ternyata masih atas dasar pada faktor primordialisme atau faktor kekerabatan. Sementara faktor yang berpengaruh ialah pengutaannya nilai solidaritas kedua calon tersebut. Dari argumentasi yang terbangun diatas bahwa faktor kinsip sangat berpengaruh pada pilihan orang lain terhadap calon yang berkaiatan atau memiliki hubungan darah dengan mereka sendiri.

Sama halnya dengan temuan (Buling dan Aloysius L.S. Soesilo 2021), menunjukkan bahwa aturan masyarakat tradisional, kedudukan kekuasaan dan ikatan keluarga mempengaruhi pola komunikasi antar anggota dalam keluarga yang dapat juga berpengaruh terhadap pilihan politik. Konteks budaya dalam suatu daerah menjadi salah satu hal yang tidak dapat terlepas pada saat terjadinya komunikasi dalam keluarga. Pola patriarki pembentukan keluarga tradisional Alor yang mempertahankan otoritas ayah dan keluarga ayah, kemudian hampir tidak menimbulkan perbedaan komunikasi dan penghormatan antara keluarga inti dan keluarga besar, yaitu kepada saudara laki-laki ayah.

Otoritas dalam bentuk keluarga tradisional ini mempengaruhi pola komunikasi dalam keluarga yang memiliki dimensi konformitas dan percakapan. Pola patriarki pembentukan keluarga tradisional Alor yang mempertahankan otoritas ayah dan keluarga ayah, kemudian hampir tidak menimbulkan perbedaan komunikasi dan penghormatan antara keluarga inti dan keluarga besar, yaitu kepada saudara laki-laki ayah. Otoritas dalam bentuk keluarga tradisional ini mempengaruhi pola komunikasi dalam keluarga yang memiliki dimensi konformitas dan percakapan.

Hubungannya dengan temuan tersebut, (Ayustina 2022) dalam temuan bahwa politik

kekerabatan sangat menentukan dalam setiap ajang pemilihan karena hal terbukti pada pemilihan kepala desa yang berada Desa Hulo Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, bahwa politik kekerabatan sangat berpengaruh besar terhadap kemenangan dalam pemilihan kepala desa yang dimana bapak Hasim dapat memenangkan pertarungan akibat dari jejaring kekerabatan yang berjalan dengan baik dengan keluarga, kemudian kuatnya juga relasi yang dilakukan sehingganya bapak Hasim dapat menang dalam pemilihan.

Dari berbagai temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa ikatan kekeluargaan ataupun kekerabatan cukup kuat dalam menentukan pilihan politik masyarakat bahkan menjadi faktor terpenting pendorong pilihan politik masyarakat Tonala. Kekerabatan menjadikan masyarakat Tonala bersatu dalam ruang lingkup pemberian hak suara dalam pemilihan kepala desa. Adanya unsur kekerabatan dalam pemerintahan desa memperkuat legitimasi kekuasaan kepala DesaTonala yang memiliki kesesuaian dengan apa yang di peroleh peneliti, dimana kepala desa terpilih pada pemilihan sangadi Tonala Tahun 20222 adalah sangadi sebelumnya. Lebih jelasnya ialah sangadi terpilih ini memiliki pengaruh besar dikarenakan sebelumnya beliau sudah pernah menjabat sebagai sangadi DesaTonala.

SIMPULAN

Berdasarkan pada hasil dan temuan data lapangan serta pembahasan yang telah diuraikan di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Budaya politik masyarakat Desa Tonala terdiri atas budaya politik parokial dan budaya politik kaula/subjek. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya politik masyarakat Desa Tonala di pengaruhi oleh kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai politik. Selain budaya politik tersebut, terdapat dua faktor yang mendorong budaya politik masyarakat Desa Tonala diantaranya, faktor patron klien dan faktor kinsip. Dimana masyarakat Tonala memahami politik berdasarkan pada patron yang dituakan atau orang yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat serta memberikan hak pilih pada calon yang memiliki ikatan kekerabatan atau ikatan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, Gabriel, dan Sidney Verba. *Budaya Politik (Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara)*. Jakarta: Bumi Aksara, 1984.
- Arafah, Nawal Nur. "KH Maimun Zubair Gagasan dan Kiprahnya dalam Politik Islam di Indonesia." *Journal on Education*, 2022: 609-626.
- Astuti, Roswida Sri, dan Qolbi Khoiri. "Tantangan Lokal Dan Global Kebijakan Politik Pendidikan Islam Di Indonesia." *Journal on Education*, 2023: 4570-4581.
- Ayustina, dan Ayustina. "Politik Kekerabatan dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Hulo Kecamatan Kahu Kabupaten Bone ." *Repository UNHAS*, 2022.
- Fadli, Ichsan. "Hu2015 dibuhngan Patron Klien Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 di Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto." *Repository UIN Alaludin Makassar*, 2016.

- Kantaprawira, Rusadi. Sistem Politik Indonesia : Merupakan Suatu Pengantar . Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006.
- Kelana, Edy Putra, Rahmad, Sri Murniyanti, Fitri Ernalis, dan Risky Novialdi. "Urgensi Pendidikan Politik di Provinsi Aceh Studi Kasus: Politik Uang dalam Pemilu di Kota Sabang." *Journal on Education*, 2022: 1198-1213.
- Mahmud, Ramli, Asmun Wantu, dan Rusli Limalo. "Strengthening Local Democracy (Orientation Study of Political Culture of Coastal Communities in Dulupi District, Boalemo Regency)." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 2020: 558-565.
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Toton, Hendrikus. "Budaya Politik Masyarakat Dayak Kanayatn Desa Ongkol Padang Kecamatan Menyuke Kabupaten landak Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2014." *Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik* , 2015.
- Yusrin, dan Salpina. "Partisipasi Generasi Millenial dalam Mengawasi Tahapan Pemilu 2024." *Journal on Education*, 2023: 9646-9653 .
- Yusuf, Amriani, dan Justawan Asriani. "K MOROWALI TAHUN 2018EKERABAN POLITIK KEPALA DESA TORUKUNO DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH." *Jurnal Local Politic And Government*, 2020.